



Jateng
goyang

**IHKTISAR LAPORAN
HASIL PENGAWASAN SEMESTER I
TAHUN 2021
INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

JL. PEMUDA 127-133 TELP. (024) 3517283-3517284-3556230 FAX. (024) 3514351
SEMARANG 50132

Surel: [http://inspektorat.jatengprov.go.id](mailto:inspektorat.jatengprov.go.id) Laman: inspektorat@jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester 1 Tahun 2021. Ikhtisar ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan kepada Gubernur selaku Pimpinan Daerah Provinsi, sebagaimana tertuang dalam piagam audit intern APIP Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2017.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester 1 Tahun 2020 ini berisi kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Ikhtisar ini disusun dengan harapan dapat diketahui perkembangan seluruh hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Disusunnya Ikhtisar ini diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan pengawasan dan sebagai referensi dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan di masa mendatang dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintah yang baik.

Demikian Ikhtisan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Semester 1 Tahun 2021, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Semarang, Agustus 2021

**INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH**



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si. CA, CFA, CRP, CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19611226 198303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I INFORMASI	1
UMUM.....	
A. Dasar Hukum.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Kebijakan Strategis.....	4
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan.....	8
E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya.....	9
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	14
A. Audit/Pengawasan.....	14
1. Audit Kinerja.....	14
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).....	18
3. Target Indikator Kinerja Sasaran	13
Strategis.....	
B. Reviu.....	19
C. Pemantauan.....	20
D. Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	21
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	26
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	26
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP...	30

BAB IV	HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	33
A.	Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	33
B.	Dilimpahkan Penanganannya kepada Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya.....	34
BAB V	SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	36
A.	Kesimpulan.....	36
B.	Hambatan.....	37
C.	Rekomendasi.....	37
LAMPIRAN 1	39
LAMPIRAN 2	46
LAMPIRAN 3	53
LAMPIRAN 4	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data ASN Berdasarkan Jabatan.....	6
Tabel 2 Data ASN Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 4 Data Aset Inspektorat.....	7
Tabel 5 Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya....	13
Tabel 6 Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	15
Tabel 7 Realisasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	17
Tabel 8 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT).....	19
Tabel 9 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	19
Tabel 10 Realisasi Pemantauan.....	21
Tabel 11 Status Tindak Lanjut LHP BPK-RI	27
Tabel 12 Status Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	31
Tabel 13 Pelimpahan Aduan kepada Kabupaten/Kota.....	34

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

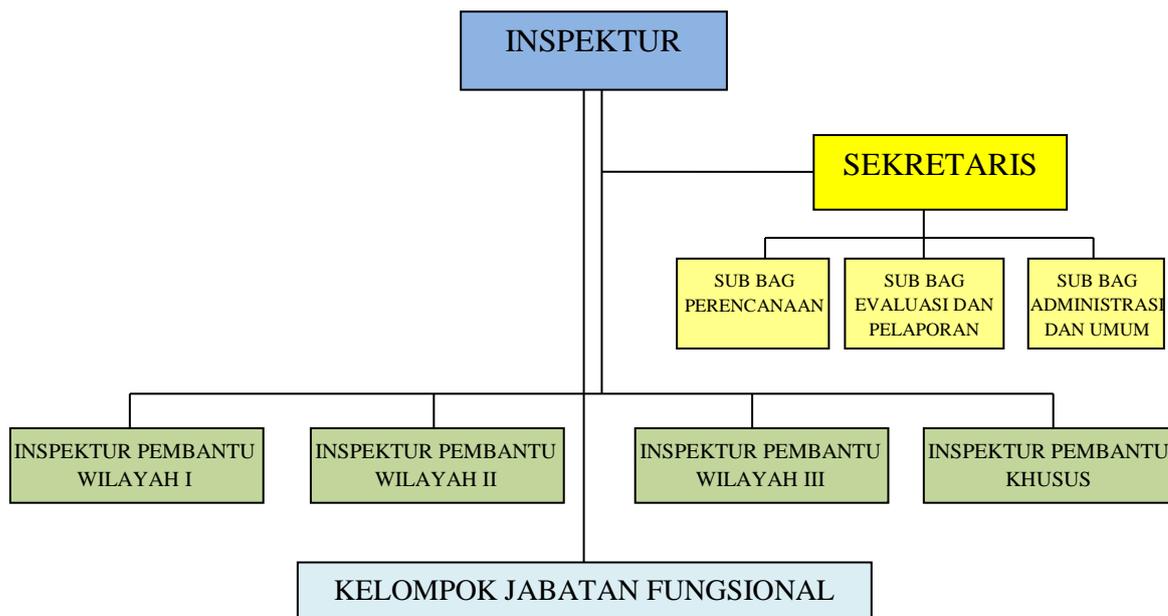
Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur organisasi dan nama pejabat dilingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:
- a. Inspektur: HENDRI SANTOSA,SE.,Ak.,M.Si.,CA,CFrA,CRP,CGCAE.
 - b. Sekretaris: NUR ROHMAT,S.Sos.,M.Si.
 - 1) Sub Bag Administrasi dan Umum: M.YUSDI NOVIADI,ST.,MBA.
 - 2) Sub Bag Perencanaan: RATNA LUHUNG T.,SE.,MM.
 - 3) Sub Bag Evaluasi&Pelaporan: SRI RAHAYUNINGSIH,SE.,MM.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I: ISKANDAR,SE.,MM.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II: SUTARYO,SE.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III: Drs. ATN TRIHANANTO
 - f. Inspektur Pembantu Khusus: DHONI WIDIANTO,S.Sos.,M.Si.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
 - 2) Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD).

Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah:



C. Kebijakan Strategis

1. Eksternal

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah “Jawa Tengah Berdikari dan Sejahtera” dengan *tag line* “Tetep Mboten Korupsi dan Mboten Ngapusi”. Misi ketiga yaitu: “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota” merupakan komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang bebas dari korupsi. Kondisi ini sejalan dengan amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Gubernur Jawa Tengah pada RPJMD 2018-2023, yaitu menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ikut berperan

aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut. Hal ini tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

2. Internal

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018 s.d. 2023 yaitu:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah;
- 2) Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

Dibutuhkan beberapa strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- 1) Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- 2) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi;
- 3) Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota;
- 4) Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- 7) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dibutuhkan kebijakan-kebijakan internal.

Arah kebijakan Pengawasan tahun 2021, yaitu:

- 1) Menjadi mitra Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reuiu;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- 3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan visi misi Kepala Daerah, maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga indikator kinerja daerah yang terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023, yaitu :

- 1) Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP;
- 2) Terselenggaranya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Tingkat maturitas SPIP.

Guna mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh:

a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Kondisi ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah per 30 Juni Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data ASN Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL				FUNGSIONAL						JUMLAH
				KHUSUS			UMUM			
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Auditor	PPUPD	Audiwan	Sekretariat	Pengolah Data	TU Bidang	
-	1	4	3	36	27	2	61	1	4	139

Tabel 2
Data ASN Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN / PANGKAT	A	B	C	D	JUMLAH
1	IV	14	15	1	1	31
2	III	33	15	20	32	100
3	II	-	1	2	5	8
4	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						139

Tabel 3
Data ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	45
2	Sarjana S1/D-IV	81
3	Diploma/D-III	4
4	SLTA (Sederajat)	9
JUMLAH		139

b. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan per 30 Juni 2021 sebagai berikut:

Tabel 4
Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.519	12.485.050.439
	- Alat Besar	6	169.042.000
	- Alat Angkutan	33	4.205.343.456
	- Alat Bengkel dan Ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	992	4.708.561.400
	- Alat Studio Komunikasi	103	982.658.165

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	Pemancar		
	- Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	346	2.217.523.418
	Gedung dan Bangunan	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	181	21.073.000
	- Bahan Perpustakaan	180	19.073.000
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	JUMLAH	1.704	25.646.008.889

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan ini, sebagai berikut:

- a. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
- c. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
- d. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- e. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

E. Kegiatan Pengawasan dan Realisasinya

Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Kegiatan Pengawasan tersebut, antara lain meliputi :

1. Kegiatan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain:
 - 1) Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - 3) Reviu Laporan Keuangan;
 - 4) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - 6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- 7) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - 8) Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan;
 - 9) Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur;
 - 10) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - 11) Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui:
- 1) Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan:
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap tri wulan);
 - c) Pembangunan Zona Integritas;
 - d) Pengendalian Gratifikasi;
 - e) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - g) Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - h) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - i) Penguatan APIP.

- 2) Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, serta peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya;
 - 3) Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan.
- c. Kegiatan penunjang pengawasan meliputi :
- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - 2) Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - 3) Koordinasi program pengawasan;
 - 4) Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.
- d. Pemantauan verifikasi pelaporan capaian aksi pencegahan pemberantasan korupsi pemerintah daerah.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengawasan terhadap urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :
 - 1) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - 2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;

- 3) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
- 4) Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
- 5) Penyelesaian batas daerah.

3. Kegiatan Pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada :

- a. Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Kependudukan dan Catatan Sipil di Daerah, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan penduduk serta pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Kerjasama Daerah, yang berkaitan dengan penentuan batas wilayah serta kerjasama daerah dengan pihak ketiga, baik Pemerintah Daerah atau *stakeholder* lain.

4. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- c. Koordinasi program pengawasan;
- d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Tabel 5
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT pada 1 Januari 2021 s.d. 31 Mei 2021

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			
		Target	Realisasi		
		Jumlah Objek	Jumlah Objek	Jumlah Temuan	Nilai Temuan (Rp.)
1.	Audit	61	39	172	727.309.965,00
	a. Kinerja	27	27	(70)	(22.979.000,00)
	b. ADTT	14	4	(38)	(704.330.965,00)
	c. Keuangan	20	8	(64)	0
2.	Reviu	14	4	4	0
3.	Pemantauan	12	5	5	0
4.	Kegiatan Pengawasan Lainnya	6	1	2	0
	Jumlah	93	49	182	727.309.965,00

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program Kerja pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah termasuk pemeriksaan kasus dan khusus, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya.

Adapun hasil kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada semester 1 Tahun 2021 (1 Januari 2021 s.d. 31 Mei 2021) adalah sebagai berikut:

A. Audit/Pengawasan

1. Audit Kinerja

Dalam pelaksanaan audit/pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan tiap tahun (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021).

Jumlah temuan dan rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 172 temuan dan 311 rekomendasi dengan nilai potensi kerugian daerah sebesar Rp727.309.965,00 sebagai berikut:

Tabel 6
Temuan Hasil Audit/Pengawasan Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
(Per 31 Mei 2021)

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp)
Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan		1	65	37,79	727.309.965,00
1	Kerugian Negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01	24	13,95	727.309.965,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02	0	0	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03	2	1,60	2.381.500,00
4	Administrasi	1.04	39	22,67	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05	0	0	0
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	77	44,77	0,00

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Temuan	%	Nilai (Rp)
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01	35	20,35	0,00
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02	28	16,28	0,00
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03	14	8,14	0,00
Temuan 3 E		3	30	17,44	0,00
1	Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan	3.01	4	2,33	0,00
2	Ketidakefisienan	3.02	3	1,74	0,00
3	Ketidakefektifan	3.03	23	13,37	0,00
Jumlah Kejadian/Temuan			172	100%	727.309.965,00

*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada Lampiran 2

Tabel 6. di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebesar 44,77%, kemudian Ketidapatuhan terhadap Peraturan dengan persentase sebesar 37,79% dan terakhir temuan 3E (Ekonomis, Efektif, Efisien) sebesar 17,44%. Oleh karena itu, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat menjadi penting dan wajib untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah sehingga dapat menekan terjadinya temuan berulang pada tahun selanjutnya.

Terhadap 172 temuan di atas, Inspektorat telah memberikan 311 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjutnya. Rekomendasi sendiri dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan

meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
(Per 31 Mei 2021)

NO	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekom	%	Nilai Temuan (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.	23	7,40	682.045.103,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	2	0,64	45.264.862,00
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0,10	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	58	18,65	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	84	27,01	0
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	19	6,11	0
8	Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung sistem pengendali	0	0,00	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	116	37,30	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.	0	0	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang.	2	0,64	0

NO	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Rekom	%	Nilai Temuan (Rp)
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.	3	0,96	0
13	Pelaksanaan Sosialisasi	4	1,29	0
14	Lain-lain	0	0	0
Jumlah		311	100,00	727.309.965,00

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa jenis rekomendasi yang paling sering diberikan adalah Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sejumlah 116 rekomendasi atau 37,30%. Sedangkan pengelompokan menurut nilai temuan maka rekomendasi penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat sebesar Rp682.045.103,00.

2. Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Pelaksanaan ADTT pada semester 1 Tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berupa Bantuan Desa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Bantuan Keuangan pada Pemerintahan Desa (Bandes) pada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Karanganyar. Realisasi audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dalam tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
1 Januari 2021 s.d. 31 Mei 2021

No	Kegiatan	PKPT	
		Target	Realisasi
		Jumlah Objek	Jumlah Objek
1.	Bandes	5	4
2.	Pemeriksaan Pelayanan Publik	2	0
3.	Investigasi	7	0
Jumlah		14	4

B. Reviu

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Reviu atas LKPD Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini WTP-DPP sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Pada tahun 2016-2020 sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 9
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

TAHUN	OPINI BPK-RI
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

TAHUN	OPINI BPK-RI
	(WTP-DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dari tabel di atas menandakan bahwa kinerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup baik selama tahun 2012 s/d tahun 2020 telah memperoleh 5 (lima) kali WTP dan 4 (empat) kali WTP-DPP. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, setiap tahunnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Sampai dengan 31 Mei 2021, dari 14 jumlah objek pemeriksaan yang seharusnya di reviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, jumlah objek yang telah direviu sebanyak 4 (empat) objek pemeriksaan.

C. Pemantauan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemantauan berupa Pemantauan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 5 (empat) kali, yaitu Pemantauan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten

Pati dan Kabupaten Karanganyar. Realisasi Pemantauan sampai dengan 31 Mei 2021, sebagaimana dalam tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Realisasi Pemantauan
1 Januari 2021 s.d. 31 Mei 2021

Rencana Kegiatan Pemantauan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2020	PKPT	
	Target	Realisasi
	Jumlah Objek	Jumlah Objek
1) Kabupaten Karanganyar	12	5
2) Kabupaten Boyolali		
3) Kabupaten Pati		
4) Kabupaten Brebes		
5) Kabupaten Purbalingga (2x)		
6) Kabupaten Karanganyar		
7) Kabupaten Boyolali		
8) Kabupaten Pati		
9) Kabupaten Brebes		
10) Kabupaten Sragen		
11) Kabupaten Rembang		
Jumlah	12	5

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, antara lain kegiatan Bimbingan Teknis sebanyak 1 (satu) kali yaitu Bintelk Penulisan Audit Report dan Karya Ilmiah yang Berkualitas (30 s.d 31 Maret 2021) dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 2 (dua) kali yaitu PKS Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (12 April 2021) PKS Penggunaan Aplikasi Sibijak (4 Mei 2021).

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal

Reformasi Birokrasi khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara spesifik, Inspektorat mengemban tugas yang sudah ditentukan dalam Pengendalian Gratifikasi, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengendalian Gratifikasi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ada Tim Program Pengendalian Gratifikasi pada seluruh Perangkat Daerah sehingga diharapkan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), selain itu juga dilaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah. Pada bulan Januari sampai dengan 30 Juni Tahun 2021 terdapat 18 laporan dengan nilai finansial Rp6.125.000,00.

Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 700/10 tanggal 7 Juli 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi

pengangkatan Pejabat Struktural dan seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan LHKPN. Pada akhir tahun 2020 jumlah Wajib Laport yang sudah melaporkan sebanyak 2.319 orang dari 2.319 orang (100%). Sementara untuk jumlah Wajib **LHKASN** per 30 Maret 2021 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 38.204 (99,99%) dari 38.207 Wajib LHKASN.

Evaluasi RB merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan Reformasi Birokrasi disuatu daerah. Adapun penilaiannya menggunakan perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan , dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dibandingkan dengan Nilai Komponen Hasil (Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik). Hasil evaluasi RB tahun 2020 oleh Kemenpan dan RB Provinsi Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,05 atau predikat "BB".

Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kemenpan dan RB untuk SAKIP Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 80,25 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah dimulai dengan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas secara serentak

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Mei 2014 yang disaksikan Menteri PAN dan RB-RI, Ketua Ombudsman RI dan Perwakilan KPK-RI. Langkah selanjutnya telah dilakukan penilaian pada beberapa SKPD/Unit Kerja dan sampai dengan tahun 2016 terdapat 1 (satu) SKPD yang telah berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yaitu RSUD Tugurejo Semarang. Pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan jumlah SKPD yang memperoleh predikat WBK yaitu 4 (empat) SKPD diantaranya RSUD Dr. Moewardi, RSUD Dr. Margono Soekarjo, RSUD Kelet dan RSJD Dr. Amino Gondohutomo.

Pada Tahun 2018 tidak ada SKPD yang memenuhi kriteria dalam hal survei kepuasan masyarakat yang merupakan indikator dalam pengusulan SKPD berpredikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Pada Tahun 2019 terdapat 1 (satu) SKPD yang memperoleh predikat WBBM yaitu RSUD Dr Margono Soekarjo. Selanjutnya pada Tahun 2020 terdapat 4 (empat) SKPD yang memperoleh predikat dari Kemenpan dan RB, 2 (dua) predikat WBBM yaitu RSUD Dr. Moewardi dan RSUD Tugurejo serta 2 (dua) predikat WBK yaitu DPMPTSP dan DLHK Wilayah I. Sedangkan untuk tahun 2021 masih dalam proses pengusulan unit kerja untuk penilaian Zona Integritas (ZI) tahun 2021.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No. LQA-299/PW11/3.1/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Laporan Penjamin Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penjaminan kualitas

menunjukkan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai skor 2,875. Dengan demikian, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai level 2 (berkembang).

Kapabilitas APIP perlu ditingkatkan pelaksanaannya oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan ditargetkan juga dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Hasil *quality wssurance* BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu dari “Level 2 Dengan Catatan” pada tahun 2016 menjadi “Level 3 Dengan Catatan” pada tahun 2017. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kapabilitas APIP, sehingga Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai Level 3 Penuh pada tahun 2019. Sampai dengan tahun 2020 capaian indikator kinerja pada sasaran Kapabilitas APIP masih menggunakan penilaian tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilakukan asesmen dari BPKP terkait penilainan Level tersebut.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan upaya antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut ke Kabupaten/Kota dan perangkat daerah melalui APIP dalam penugasan untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti. Hal tersebut antara lain disebabkan terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit ditindaklanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru terbit.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Pada tahun 2021 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Pembahasan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan yaitu pada bulan Juni 2021. Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d 15 Juli 2021 sebanyak 59 LHP dengan jumlah temuan dari tahun 2005 s/d 15 Juli 2021 sebanyak 755 temuan dan 1.779 rekomendasi. Rekapitulasi status tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK-RI sebagai berikut:

Tabel 11
Status Tindak Lanjut LHP BPK-RI
Tahun 2005 s.d. 2021
(Per 15 Juli 2021)

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindak Lanjuti dengan alasan yang sah
1	LKPD Tahun 2020	10	26	0	0	26	0
2	Kinerja Permodalan 2020	13	33	0	0	33	0
3	Kinerja SPBE 2019-2020	13	37	0	0	37	0
4	Kepatuhan Penanganan Covid-19	9	15	0	0	15	0
5	Kinerja Bank Jateng 2020	12	74	0	0	74	0
6	Investasi SPHC	8	23	0	0	23	0
7	LKPD Tahun 2019	14	54	11	43	0	0
8	Indek Pembangunan Manusia TA 2016 s.d 2018	6	31	14	17	0	0
9	PDTT atas Operasional BPD Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019	6	8	0	8	0	0
10	LKPD Tahun 2018	23	43	22	21	0	0
11	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana TA 2017 dan 2018 (semester I)	17	49	44	5	0	0
12	LKPD Tahun 2017	26	58	37	21	0	0
13	Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	14	39	6	33	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindak lanjuti dengan alasan yang sah
14	LKPD Tahun 2016	18	32	25	7	0	0
15	Kinerja Tata Kelola Pemda dalam Pembinaan BUMD TA 2011-2016 pada Pemprov Jawa Tengah	10	34	22	12	0	0
16	Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemda dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014-2016 pada Pemprov Jawa Tengah	11	44	42	2	0	0
17	PNPM Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	11	12	12	0	0	0
18	LKPD TA 2015	28	73	64	9	0	0
19	Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d. 2015 *)	6	10	6	4	0	0
20	Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Prov.Jateng	8	21	21	0	0	0
21	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	5	17	17	0	0	0
22	Kinerja Efektifitas Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	6	14	12	2	0	0
23	LKPD TA 2014	33	108	91	17	0	0
24	Kinerja Operasional RSUD Prof. DR. Margono Soekardjo TA 2013 dan 2014	17	28	28	0	0	0
25	Operasional PT BPD Jateng TA 2013-2014	32	66	55	11	0	0
26	LKPD TA 2013	21	62	57	5	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindak lanjuti dengan alasan yang sah
27	Operasional Pilkada Thn 2013 pada KPU dan Bawaslu Jawa Tengah	17	47	47	0	0	0
28	Kinerja APIP Thn 2012	25	52	52	0	0	0
29	LKPD TA 2012	13	29	29	0	0	0
30	Operasional PT BPD Jateng TB 2011-2012	18	38	33	5	0	0
31	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA. 2012	8	13	12	1	0	0
32	LKPD TA 2011	18	40	35	5	0	0
33	Kinerja RSUD dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah TA 2010-2011	12	21	21	0	0	0
34	Belanja Provinsi Jateng TA 2010-2011	12	29	29	0	0	0
35	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010	9	55	20	35	0	0
36	Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 - 2012	11	14	14	0	0	0
37	LKPD TA 2010	12	26	26	0	0	0
38	Operasional BPD Jateng TA 2010	11	23	22	1	0	0
39	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2009 dan 2010	14	27	26	1	0	0
40	LKPD TA 2009	11	20	19	1	0	0
41	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi	5	11	11	0	0	0
42	LKPD TA 2008	17	35	32	3	0	0
43	Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008	7	13	5	8	0	0
44	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya 2007-2008 Pada Pemprov Jateng	13	25	25	0	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekom	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindak lanjuti dengan alasan yang sah
45	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya 2007-2008 Pada Kanwil Departemen Agama Prov. Jateng	19	39	0	0	0	39
46	Operasional BPD Jateng TB 2007 dan 2008	19	32	32	0	0	0
47	LKPD TA 2007	20	40	40	0	0	0
48	Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2007 dan Smt I 2007	3	4	4	0	0	0
49	LKPD TA 2006	20	43	43	0	0	0
55	Perusda Provinsi Jawa Tengah dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA 2005-2006	13	20	20	0	0	0
56	LKPD TA 2005	19	28	28	0	0	0
57	Kinerja BPD Jateng TB 2004	16	25	25	0	0	0
58	Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2004 dan 2005	8	12	12	0	0	0
59	LKPD TA 2004	6	7	7	0	0	0
TOTAL		734	1740	1255	277	208	39

**Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1*

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Data hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan mulai tahun 2014 menggunakan *database* yang tersimpan pada aplikasi SIMWAS sedangkan tahun 2002 s/d 2013 masih menggunakan data manual.

Sampai dengan 30 Juni 2021 jumlah temuan sebanyak 33.539 temuan dengan 40.842 rekomendasi, status temuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. 32.016 temuan dengan 38.754 rekomendasi telah sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
- b. 824 temuan dengan 1.234 rekomendasi dalam proses tindak lanjut; dan
- c. 699 temuan dengan 854 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Rincian temuan dan rekomendasi tersebut berdasarkan tahun pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Status Tindak Lanjut LHP
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 s.d. 2021
(Per 31 Mei 2021)

No	Tahun	Jumlah Temuan / Status				Jumlah Rekomendasi / Status			
		Σ	S	D	B	Σ	S	D	B
1	2021	172	10	7	155	311	20	28	263
2	2020	628	231	161	236	810	330	235	245
3	2019	1.489	1.233	135	121	1.856	1.544	184	128
4	2018	1.641	1.427	78	136	2.371	2.095	115	161
5	2017	1.168	1.122	45	1	1.789	1.696	91	2
6	2016	2.115	2.035	77	3	2.864	2.721	140	3
7	2015	2.260	2.188	71	1	3.100	2.972	127	1
8	2014	1.818	1.735	62	21	2.530	2.381	123	26

9	2013 s/d 2002	22.248	22.035	188	25	25.211	24.995	191	25
	Jumlah	33.539	32.016	824	699	40.842	38.754	1.234	854

Keterangan:

Σ = jumlah temuan

S = selesai ditindaklanjuti

D = dalam proses tindak lanjut

B = belum ditindaklanjuti

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019 telah memberikan penghargaan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan predikat Peringkat I Kinerja Pengawasan terbaik Tahun 2019. Prestasi ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 (satu) kali pemeriksaan yaitu Efektivitas Penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan 15 Juli tahun 2021 terdapat 176 temuan dengan 249 rekomendasi. Status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 175 temuan dan 248 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti. Adapun status temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana Lampiran 3.

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi aduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, limpahan atau yang diterima dari Instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah. Sejak Januari 2021 sampai dengan 15 Juli 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat sebanyak 29 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 8, Lapor Gub sebanyak 13, Media Sosial sebanyak 5, limpahan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 1.

Penanganan aduan masyarakat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu pengaduan dilakukan dengan diperiksa sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 aduan, pengaduan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sebanyak 22, pengaduan diarsipkan sebanyak 1 dan pengaduan yang dikonfirmasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.

A. Dilakukan Pemeriksaan Sendiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemeriksaan aduan masyarakat sebanyak 5 (lima) kasus dengan perincian yaitu telah ditindaklanjuti sebanyak 3 dengan hasil semuanya tidak terbukti, dalam proses penanganan tindaklanjut sebanyak 1 aduan dan 1 aduan belum ditindaklanjuti.

B. Dilimpahkan penanganannya kepada Kabupaten/Kota

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melimpahkan aduan masyarakat kepada Kabupaten/Kota sebanyak 22 (dua puluh dua) aduan.

Tabel 13
Pelimpahan Aduan kepada Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Aduan Dilimpahkan
1.	Kabupaten Grobogan	3
2.	Kabupaten Jepara	2
3.	Kabupaten Magelang	2
4.	Kabupaten Batang	2
5.	Kabupaten Blora	2
6.	Kabupaten Banjarnegara	2
7.	Kabupaten Wonosobo	2
8.	Kabupaten Pati	2
9.	Kabupaten Brebes	2
10.	Kota Semarang	1
11.	Kabupaten Kebumen	1
12.	Kabupaten Tegal	1
Jumlah		22

Dari 22 aduan tersebut, 6 aduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota dengan hasil semuanya tidak terbukti dan 16 aduan dalam proses penanganan.

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi semester 1 tahun 2021 sebanyak 172 temuan yang meliputi Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan sebanyak 65 (37,79%), Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 77 (44,77%) dan Temuan 3E sebanyak 30 (17,44%) dan menghasilkan 311 rekomendasi, dengan presentase terbesar adalah perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan sejumlah 116 rekomendasi atau 37,30%.
3. Pada semester 1 tahun 2021 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima aduan masyarakat menerima sebanyak 29 aduan, yang terdiri dari surat aduan sebanyak 8, Laporan Gub sebanyak 13, Media Sosial sebanyak 5, limpahan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebanyak 1.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP, terdapat rekomendasi yang belum selesai tindaklanjutnya sampai dengan semester 1 tahun 2021 yaitu :
 - a. Hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.197 rekomendasi yang telah selesai (77,59%), 296 rekomendasi

dalam proses tindak lanjut (19,85%), dan 59 rekomendasi belum ditindaklanjuti (0,06%).

- b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.197 rekomendasi yang telah selesai, 296 rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan 59 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- c. Hasil pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 terdapat 176 temuan dengan 249 rekomendasi. Dari status temuan dan rekomendasi tindak lanjut tersebut sebanyak 175 temuan dan 248 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

B. Hambatan

- 1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
- 2. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh Pemerintah pusat diluar tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Objek pemeriksaan baik Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah.

C. Rekomendasi

- 1. Perlu dibuat kebijakan terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Auditi.
- 2. Meningkatkan bimbingan teknis pengawasan terutama audit kineja di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
TAHUN 2002 S.D. 2021
(Per 15 JULI 2021)**

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tahun Pemeriksaan 2021 Semester 1													
a	LKPD Tahun 2020	10	81,778,099,014.49	26	145,164,141.49	0	0	0	0	26	145,164,141.49	0	0	
b	Kinerja Permodalan Tahun 2020	13	0	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	
	Jumlah Th. 2001 Semester 1	23	81,778,099,014.49	59	145,164,141.49	0	0	0	0	59	145,164,141.49	0	0	
1	Tahun Pemeriksaan 2020													
a	LKPD Tahun 2019	14	943,002,341.33	54	943,002,341.33	11	250,889,226.13	43	692,133,115.20	0	0	0	0	
b	Kinerja SPBE 2019-2020	13	0	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	
c	Kepatuhan Penanganan Covid-19	9	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	
d	Kinerja Bank Jateng 2020	12	0	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	
e	Investasi SPHC 2020	8	5,299,632,999.00	23	4,404,432,999.00	0	0	0	0	23	4,404,432,999.00	0	0	
	Jumlah Th. 2020	56	6,242,635,340.33	203	5,347,435,340.33	11	250,889,226.13	43	692,133,115.20	149	4,404,432,999.00	0	0	
2	Tahun Pemeriksaan 2019													
a	Indek Pembangunan Manusia TA 2016 s.d 2018	6	-	31	-	14	-	17	-	0	-	0	-	

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	PDTT atas Oprasional BPD Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019	6	-	8	-	0	-	8	-	0	-	0	-
c	LKPD Tahun 2018	23	4,760,376,658.29	43	4,760,376,658.29	22	2,175,588,142.73	21	2,584,788,515.56	0	-	0	-
	Jumlah Th. 2019	35	4,760,376,658.29	82	4,760,376,658.29	36	2,175,588,142.73	46	2,584,784,515.56	0	-	0	0
3	Tahun Pemeriksaan 2018												
a	LKPD Tahun 2017	26	4,352,135,169.97	58	3,942,862,764.97	37	3,616,697,272.30	21	326,165,492.67	0	-	0	-
b	Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahap Prabencana TA 2017 dan 2018 (semester I)	17	-	49	-	44	-	5	-	0	-	0	-
	Jumlah Th. 2018	43	4,352,135,169.97	107	3,942,862,764.97	81	3,616,697,272.30	26	326,165,492.67	0	-	0	0
4	Tahun Pemeriksaan 2017												
a	LKPD Tahun 2016	18	2,397,949,613.20	32	2,397,949,613.20	25	2,397,949,613.20	7	-	0	-	0	-
b	Manajemen Aset TA 2016 dan 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	14	-	39	-	6	-	33	-	0	-	0	-
	Jumlah Th. 2017	32	2,397,949,613.20	71	2,397,949,613.20	31	2,397,949,613.20	40	-	0	-	0	0
5	Tahun Pemeriksaan 2016												
a	LKPD TA 2015	28	2,735,813,152.30	73	3,715,689,152.30	64	772,884,052.30	9	1,962,929,100.00	0	-	0	-
b	Kegiatan Operasional dan Investasi PT Sarana Patra Hulu Cepu Tahun Buku 2014 s.d. 2015 *)	6	-	10	-	6	-	4	-	0	-	0	-
c	Kinerja Tata Kelola Pemda dalam Pembinaan BUMD TA	10	-	34	-	22	-	12	-	0	-	0	-

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2011-2016 pada Pemprov Jawa Tengah												
d	Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemda dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014-2016 pada Pemprov Jawa Tengah	11	-	44	-	42	-	2	-	0	-	0	0
	Jumlah Th. 2016	55	2,735,813,152.30	161	3,715,689,152.30	134	772,884,052.30	27	1,962,929,100.00	0	-	0	0
6	Tahun Pemeriksaan 2015												
a	LKPD TA 2014	33	4,135,352,824.74	108	663,073,923.46	91	507,161,022.76	17	155,912,900.70	0	-	0	-
b	Kinerja Efektifitas Implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	6	-	14	-	12	-	2	-	0	-	0	0
c	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015	5	1,984,580,167.03	17	1,984,580,167.03	17	1,984,580,167.03	0	-	0	-	0	-
d	Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	8	-	21	-	21	-	0	-	0	-	0	-
	Jumlah Tahun 2015	52	6,119,932,991.77	160	2,647,654,090.49	141	2,491,741,189.79	19	155,912,900.70	0	-	0	0
7	Tahun Pemeriksaan 2014												
a	LKPD TA 2013	21	1,042,532,185.53	62	1,042,532,185.53	57	1,042,532,185.53	5	-	0	-	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	Kinerja Operasional RSUD Prof. DR. Margono Soekardjo TA 2013 dan 2014	17	5,272,720,017.51	28	288,152,868.94	28	288,152,868.94	0	-	0	-	0	0
c	Operasional PT BPD Jateng TA 2013-2014	32	179,162,421,902.11	66	132,096,321,048.45	55	84,726,582,838.85	11	47,369,738,209.60	0	-	0	0
Jumlah Th. 2014		70	185,477,674,105.15	156	133,427,006,102.92	140	86,057,267,893.32	16	47,369,738,209.60	0	-	0	0
8	Tahun Pemeriksaan 2013												
a	Operasional Pilkada Thn 2013 pada KPU dan Bawaslu Jawa Tengah	17	1,032,316,397.00	47	1,014,144,497.00	47	1,014,144,497.00	0	-	0	-	0	0
b	Kinerja APIP Thn 2012	25	-	52	-	52	-	0	-	0	-	0	0
c	LKPD TA 2012	13	524,818,000.00	29	524,818,000.00	29	524,818,000.00	0	-	0	-	0	0
d	Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 - 2012	11	142,379,513.73	14	142,379,513.73	14	142,379,513.73	0	-	0	-	0	0
Jumlah Th. 2013		66	1,699,513,910.73	142	1,681,342,010.73	142	1,681,342,010.73	0	-	0	-	0	0
9	Tahun Pemeriksaan 2012												
a	LKPD TA 2011	18	2,335,147,801.00	40	1,987,891,611.00	35	1,987,891,611.00	5	-	0	-	0	0
b	Operasional PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA. 2012	8	-	13	-	12	-	1	-	0	-	0	0
c	Operasional PT BPD Jateng TB 2011-2012	18	15,300,407,190.00	38	10,464,667,860.00	33	3,981,412,813.00	5	6,483,255,047.00	0	-	0	0
Jumlah Th. 2012		44	17,635,554,991.00	91	12,452,559,471.00	80	5,969,304,424.00	11	6,483,255,047.00	0	-	0	0
10	Tahun Pemeriksaan 2011												

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	LKPD TA 2010	12	666,521,328.00	26	666,521,328.00	26	666,521,328.00	0	-	0	-	0	0
b	Belanja Propinsi Jateng TA 2010-2011	12	867,431,057.99	29	867,431,057.99	29	867,431,057.99	0	-	0	-	0	0
c	Kinerja RSUD dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah TA 2010-2011	12	-	21	-	21	-	0	-	0	-	0	0
d	Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBD TA 2010	9	128,875,889.00	55	128,875,889.00	20	128,875,889.00	35	-	0	-	0	0
	Jumlah Th. 2011	45	1,662,828,274.99	131	1,662,828,274.99	96	1,662,828,274.99	35	-	0	-	0	0
11	Tahun Pemeriksaan 2010												
a	LKPD TA 2009	11	976,170,781.05	20	976,170,781.05	19	6,380,201.00	1	969,790,580.05	0	-	0	0
b	PNPM Mandiri Perdesaan TA 2008 dan 2009 pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	11	11,650,000.00	12	11,650,000.00	12	11,650,000.00	0	-	0	-	0	0
c	Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi	5	3,491,494,657.46	11	245,732,688.99	11	245,732,688.99	0	-	0	-	0	0
d	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2009 dan 2010	14	488,547,225.00	27	462,877,225.00	26	461,947,225.00	1	930,000.00	0	-	0	0
e	Operasional BPD Jateng TA 2010	11	6,928,588,309.00	23	6,444,088,309.00	22	1,186,838,323.00	1	5,257,249,986.00	0	-	0	0
	Jumlah Th. 2010	52	11,896,450,972.51	93	8,140,519,004.04	90	1,912,548,437.99	3	6,227,970,566.05	0	-	0	0

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Tahun Pemeriksaan 2009													
a	LKPD TA 2008	17	212,311,104.98	35	212,311,104.98	32	62,083,288.00	3	150,227,816.98	0	-	0	0	
b	Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008	7	947,934,146.22	13	947,934,146.22	5	112,722,419.00	8	835,211,727.22	0	-	0	0	
	Jumlah Tahun 2009	24	1,160,245,251.20	48	1,160,245,251.20	37	174,805,707.00	11	985,439,544.20	0	-	0	0	
13	Tahun Pemeriksaan 2008													
a	LKPD TA 2007	20	21,385,027,425.48	40	20,710,817,809.00	40	20,710,817,809.00	0	-	0	-	0	0	
b	Operasional BPD Jateng TB 2007 dan 2008	19	-	32	-	32	-	0	-	0	-	0	0	
c	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya 2007-2008	13	1,382,344,934.00	25	1,382,344,934.00	25	1,382,344,934.00	0	-	0	-	0	0	
	Jumlah Tahun 2008	52	22,767,372,359.48	97	22,093,162,743.00	97	22,093,162,743.00	0	-	0	-	0	0.00	
14	Tahun Pemeriksaan 2007													
a	LKPD TA 2006	20	17,707,186.14	43	17,707,186.14	43	17,707,186.14	0	-	0	-	0	0	
b	Pengelolaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2007 dan Smt I 2007	3	-	4	-	4	-	0	-	0	-	0	0	
	Jumlah Tahun 2007	23	17,707,186.14	47	17,707,186.14	47	17,707,186.14	0	-	0	-	0	0	
15	Tahun Pemeriksaan 2006													
a	LKPD TA 2005	19	2,929,728,157.00	28	2,475,133,157.00	28	2,475,133,157.00	0	-	0	-	0	0	
b	Perusda Provinsi Jawa Tengah dan PT Sarana	13	1,328,890,115.78	20	1,328,890,115.78	20	1,328,890,115.78	0	-	0	-	0	0	

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) TA 2005-2006													
	Jumlah Tahun 2006	32	4,258,618,272.78	48	3,804,023,272.78	48	3,804,023,272.78	0	-	0	-	0	0	
16	Tahun Pemeriksaan 2005													
a	LKPD TA 2004	6	87,006,179.00	7	87,006,179.00	7	87,006,179.00	0	-	0	-	0	0	
b	Kinerja BPD Jateng TB 2004	16	26,359,993.92	25	26,359,993.92	25	26,359,993.92	0	-	0	-	0	0	
c	Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2004 dan 2005	8	5,771,394,781.61	12	5,771,394,781.61	12	5,771,394,781.61	0	-	0	-	0	0	
	Jumlah Tahun 2005	30	5,884,760,954.53	44	5,884,760,954.53	44	5,884,760,954.53	0	-	0	-	0	0	
	TOTAL	734	360,847,668,219.00	1,740	213,281,286,032.00	1,255	140,963,500,401.00	277	66,788,312,491.00	208	4,549,597,140.00	0	0	

Semarang, Agustus 2021
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH


HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA, CfrA, CRP, CGCAE
 Pembina Utama Madya
 NIP 19611226 198303 1 001

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2002 S.D. 2021
(PER 31 Mei 2021)**

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2021												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	65	98	727.309.965,00	5	10	51.990.694,00	2	9	181.012.000,00	58	79	494.307.271,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	77	153	0	1	2	0	3	11	0	73	140	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	30	60	0	4	8	0	2	8	0	24	44	0
	Jumlah Sub A	172	311	727.309.965,00	10	20	51.990.694,00	7	28	181.012.000,00	155	263	494.307.271,00
B	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2020												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	84	104	189.205.855,00	24	28	20.033.560,00	18	24	65.631.816,00	42	52	103.540.479,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	193	207	0	56	64	0	19	20	0	118	123	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	17	22	0	3	3	0	0	0	0	14	19	0

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Ekonomis)												
	Jumlah Sub B	294	333	189.205.855,00	83	95	20.033.560,00	37	44	65.631.816,00	174	194	103.540.479,00
C	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2020												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	186	288	1.282.381.978,96	92	152	728.617.215,98	48	83	163.046.330,98	46	53	390.718.432,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	160	192	0	40	51	0	48	68	0	72	73	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	52	84	0	31	53	0	15	23	0	6	8	0
	Jumlah Sub C	398	564	1.282.381.978,96	163	256	728.617.215,98	111	174	163.046.330,98	124	134	390.718.432,00
D	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2019												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	214	262	323.204.836,13	139	186	306.786.528,13	19	24	14.446.318,00	56	52	1.971.990,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	154	190	0	102	123	0	11	15	0	41	52	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	47	61	0	34	47	0	5	6	0	8	8	0
	Jumlah Sub D	415	513	323.204.836,13	275	356	306.786.528,13	35	45	14.446.318,00	105	112	1.971.990,00
E	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2019												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap	596	788	3.999.485.295,17	531	704	3.611.176.952,82	56	76	332.495.142,35	9	8	55.813.200,00

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peraturan												
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	333	387	0	301	343	0	29	41	0	3	3	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	145	168	0	128	143	0	15	22	0	2	3	0
	Jumlah Sub E	1074	1343	3.999.485.295,17	960	1190	3.611.176.952,82	100	139	332.495.142,35	14	14	55.813.200,00
F	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2018												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	287	426	731.120.132,33	273	406	700.136.544,33	10	14	12.025.000,00	4	6	18.958.588,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	248	298	0	214	258	0	7	7	0	27	33	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	132	164	0	131	163	0	1	1	0	0	0	0
	Jumlah Sub F	667	888	731.120.132,33	618	827	700.136.544,33	18	22	12.025.000,00	31	39	18.958.588,00
G	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2018												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	578	942	1.318.507.651,71	501	836	1.151.891.936,07	32	52	152.460.715,64	45	54	14.155.000,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	304	410	0	238	333	0	22	28	0	44	49	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	92	131	0	72	102	0	4	10	0	16	19	0
	Jumlah Sub G	974	1483	1.318.507.651,71	811	1271	1.151.891.936,07	58	90	152.460.715,64	105	122	14.155.000,00

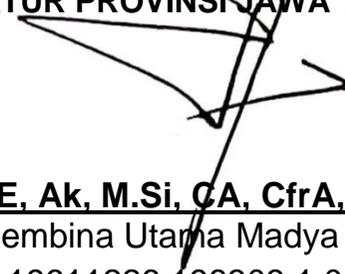
No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2017												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	224	339	201.318.911,30	217	329	201.318.911,30	7	10	0	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	195	280	0	183	256	0	12	24	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	97	128	0	95	125	0	2	3	0	0	0	0
	Jumlah Sub H	516	747	201.318.911,30	495	710	201.318.911,30	21	37	0,00	0	0	0,00
I	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2017												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	483	803	1.393.283.619,79	464	756	1.303.673.857,92	19	47	89.609.761,87	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	99	145	0	97	141	0	1	2	0	1	2	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	70	94	0	66	89	0	4	5	0	0	0	0
	Jumlah Sub I	652	1042	1.393.283.619,79	627	986	1.303.673.857,92	24	54	89.609.761,87	1	2	0,00
J	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2016												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	320	429	4.006.270.377,45	300	395	3.835.316.977,45	17	31	170.953.400,00	3	3	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	193	254	0	182	241	0	11	13	0	0	0	0

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	114	162	0	110	156	0	4	6	0	0	0	0
	Jumlah Sub J	627	845	4.006.270.377,45	592	792	3.835.316.977,45	32	50	170.953.400,00	3	3	0,00
K	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2016												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	921	1.291	9.635.063.008,61	891	1.233	9.520.661.185,17	30	58	114.401.823,44	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	371	464	6.495.000,00	362	450	6.495.000,00	9	14	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	196	264	0	190	246	0	6	18	0	0	0	0
	Jumlah Sub K	1488	2019	9.641.558.008,61	1443	1929	9.527.156.185,17	45	90	114.401.823,44	0	0	0,00
L	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2015												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	315	412	3.437.604.656,48	306	401	2.146.976.202,48	9	11	1.290.628.454,00	0	0	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	253	318	0	249	312	0	4	6	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	128	152	0	127	151	0	1	1	0	0	0	0
	Jumlah Sub L	696	882	3.437.604.656,48	682	864	2.146.976.202,48	14	18	1.290.628.454,00	0	0	0,00
M	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2015												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	897	1.356	2.475.800.514,62	858	1.276	1.924.606.400,69	38	79	551.194.113,93	1	1	0

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	424	529	0	411	508	0	13	21	0	0	0	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	243	333	0	237	324	0	6	9	0	0	0	0
	Jumlah Sub M	1564	2218	2.475.800.514,62	1506	2108	1.924.606.400,69	57	109	551.194.113,93	1	1	0,00
N	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT II TA 2014												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	362	498	734.523.772,43	354	489	711.611.532,43	7	8	22.912.240,00	1	1	0
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	248	318	0	243	308	0	2	8	0	3	2	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	223	304	0	219	298	0	2	4	0	2	2	0
	Jumlah Sub N	833	1120	734.523.772,43	816	1095	711.611.532,43	11	20	22.912.240,00	6	5	0,00
O	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2014												
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	568	881	2.580.388.331,19	518	777	1.874.946.863,87	41	91	677.407.089,32	9	13	28.034.378,00
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern	227	289	0	215	273	0	9	11	0	3	5	0
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)	190	240	0	186	236	0	1	1	0	3	3	0
	Sub Jumlah P	985	1410	2.580.388.331,19	919	1286	1.874.946.863,87	51	103	677.407.089,32	15	21	28.034.378,00

No	HP SEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)	Temuan	Saran	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P	SALDO REKAPITULASI HP/AUDIT TA 2002 S.D TA 2013												
	Sub Jumlah O	718	1.007	297.616.453	287	387	94.316.724	14	30	11.054.152	417	590	192.245.578
	Jumlah A s.d. P	12.073	16.725	33.339.580.360	10.287	14.172	28.190.557.086	635	1.053	3.849.278.358	1151	1.500	1.299.744.916

Semarang, Agustus 2021
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA, CfrA, CRP, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19611226 198303 1 001

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011 S.D. 2021
(PER 15 JULI 2021)**

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			SALDO TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	HP TAHUN 2020													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	3	3	0,00	2	2	0,00	1	1	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah A	3	3	0,00	2	2	0,00	1	1	0,00	0	0	0,00	
B	HP TAHUN 2019													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	13	25	0	13	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah B	13	25	0	13	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
C	HP TAHUN 2018													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	16	34	0,00	16	34	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah C	16	34	0,00	16	34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
D	HP TAHUN 2017													
	Tidak Mencantumkan Kode temuan	20	29	0,00	20	29	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			SALDO TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Jumlah D	20	29	0,00	20	29		0	0	0,00	0	0	0,00	
E	HP TAHUN 2016													
	Tidak mencantumkan kode temuan	15	20	0,00	15	20	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah E	15	20	0.00	15	20	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
F	HP TAHUN 2015													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	28	0,00	20	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah F	20	28	0,00	20	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
G	HP TAHUN 2014													
	Tidak mencantumkan kode temuan	21	31	0,00	20	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah G	21	31	0,00	20	31	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
H	HP TAHUN 2013													
	Tidak mencantumkan kode temuan	20	21	0,00	20	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah H	20	21	0,00	20	21	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
I	HP Tahun 2012													
	Tidak mencantumkan kode temuan	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah I	35	44	172.236.000,00	35	44	172.236.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
J	HP Tahun 2011													
	Tidak mencantumkan kode temuan	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sub Jumlah J	13	14	86.845.000,00	13	14	86.845.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

No	HP SEMESTERAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES TL			SALDO TEMUAN BELUM DITINDAK LANJUTI			KET **
	Kelompok/ Kode Temuan	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Total A-J	176	249	259.081.000,00	175	248	259.081.000,00	1	1	0,00	0	0	0,00	

Semarang, Agustus 2021
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA, CfrA, CRP, CGCAE

Pembina Utama Madya
NIP 19611226 198303 1 001

**REKAPITULASI HASIL PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2021
(PER 15 JULI 2021)**

Asal Pengaduan							Status Tindak Lanjut			Jumlah
Surat Aduan	Laporgub	Media Sosial	Limpahan Irjen	Limpahan Setneg	Limpahan KPK	Limpahan Menteri	S	D	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13	5	1	1	0	1	11	17	1	29

Semarang, Agustus 2021
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA, CfrA, CRP, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19611226 198303 1 001